



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1500, 2017

BAWASLU. Laporan Pelanggaran.
PilGubdanWagub, Bupati dan Wabup, Wali kota
dan Wawali. Pencabutan.

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHANGUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,

SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

2. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
3. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.
7. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Provinsi.

8. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
10. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
11. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.
12. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan.
13. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
14. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
15. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU

Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.

16. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
17. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
18. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.
19. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
20. Penindakan adalah serangkaian proses penanganan pelanggaran yang meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
21. Temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilihan yang mengandung dugaan pelanggaran.
22. Laporan Dugaan Pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada Pengawas Pemilihan tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilihan.
23. Pelapor adalah orang yang berhak melaporkan kasus dugaan pelanggaran Pemilihan yang terdiri dari Warga

Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau Pemilihan, dan/atau Peserta Pemilihan.

24. Pelanggaran Pemilihan adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan.
25. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan.
26. Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
27. Tindak Pidana Pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
28. Hari adalah 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam dalam hari menurut kalender.

Pasal 2

- (1) Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dilaksanakan oleh pengawas Pemilihan yang terdiri atas:
 - a. Bawaslu Provinsi;
 - b. Panwas Kabupaten/Kota;
 - c. Panwas Kecamatan atau nama lain;
 - d. PPL; dan
 - e. Pengawas TPS.
- (2) Dalam melaksanakan penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawas Pemilihan dapat dibantu pegawai jajaran Sekretariat Jenderal dan sekretariat pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya yang mendapat surat tugas untuk melaksanakan pengawasan dari Ketua atau Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwas Kabupaten/Kota.

BAB II
LAPORAN DAN TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dapat berasal dari:

- a. laporan; atau
 - b. Temuan,
- pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Bagian Kedua
Temuan

Pasal 4

Hari Temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan dihitung sejak hari saat pengawas Pemilihan mengetahui dan/atau menemukan dugaan Pelanggaran Pemilihan.

Pasal 5

- (1) Laporan hasil pengawasan disampaikan dalam rapat pleno untuk menentukan terdapat ada atau tidaknya dugaan pelanggaran.
- (2) Terhadap laporan hasil pengawasan yang diduga adanya Pelanggaran Pemilihan ditetapkan menjadi Temuan berdasarkan rapat pleno pengawas Pemilihan.
- (3) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan syarat sebagai berikut:
 - a. penemu dugaan pelanggaran merupakan pengawas Pemilihan;
 - b. waktu Temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukan;
 - c. identitas pelaku; dan
 - d. peristiwa dan uraian kejadian,yang dituangkan dalam formulir model A.2.

Bagian Ketiga

Laporan

Pasal 6

- (1) Laporan Dugaan Pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan dapat disampaikan oleh:
 - a. warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih pada pemilihan setempat;
 - b. pemantau Pemilihan; atau
 - c. Peserta Pemilihan.
- (2) Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemantau Pemilihan yang terakreditasi di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
- (3) Peserta Pemilihan dalam menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran dapat diwakili tim kampanye dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilihan.
- (4) Penunjukan pendamping dan/atau yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan surat kuasa.

Pasal 7

- (1) Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwas Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya Pelanggaran Pemilihan.
- (2) Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir model A.1.

Pasal 8

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwas Kabupaten/Kota dapat melimpahkan atau meneruskan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 secara berjenjang kepada pengawas Pemilihan untuk ditindaklanjuti.

- (2) Pelimpahan atau penerusan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari sejak laporan diterima.

Pasal 9

Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan disampaikan secara langsung di kantor Bawaslu atau di kantor pengawas Pemilihan yang dituangkan dalam formulir model A.1.

Pasal 10

- (1) Pelapor menandatangani formulir penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dituangkan dalam formulir model A.1.
- (2) Formulir Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan alamat Pelapor;
 - b. waktu dan tempat peristiwa terjadi;
 - c. nama dan alamat Terlapor;
 - d. nama dan alamat saksi;
 - e. uraian kejadian;
 - f. tanda tangan Pelapor; dan
 - g. alamat *e-mail*.
- (3) Dalam mengisi formulir model A.1, Pelapor melengkapi isian dalam formulir dan menyertakan data sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu identitas lain; dan
 - b. nama serta alamat saksi.
- (4) Dalam hal kelengkapan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terpenuhi, petugas penerima laporan membuat tanda bukti penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran dalam 2 (dua) rangkap yang dituangkan dalam formulir model A.3.

- (5) Petugas penerima Laporan wajib memberikan 1 (satu) rangkap tanda bukti penerimaan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pelapor dan 1 (satu) rangkap untuk pengawas Pemilihan.
- (6) Petugas penerima laporan melakukan pencatatan atas penerimaan Laporan tersebut dalam buku register penerimaan Laporan.

Bagian Keempat
Informasi Awal

Pasal 11

- (1) Dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Bawaslu atau pengawas Pemilihan dalam bentuk informasi lisan dan/atau informasi tertulis merupakan informasi awal.
- (2) Informasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. informasi dugaan pelanggaran yang disampaikan secara langsung di kantor Bawaslu atau pengawas Pemilihan;
 - b. informasi dugaan pelanggaran melalui telepon resmi pengaduan pengawas Pemilihan; atau
 - c. informasi dugaan pelanggaran yang disampaikan dalam bentuk surat, pesan singkat melalui telepon, faksimili, surat elektronik, atau di situs resmi pengawas Pemilihan.
- (3) Informasi awal yang berupa informasi lisan dicatat oleh pengawas Pemilihan untuk kemudian dilakukan penelusuran.
- (4) Hasil penelusuran informasi awal yang mengandung dugaan Pelanggaran Pemilihan ditindaklanjuti dengan mekanisme Temuan pengawas pemilihan.

Pasal 12

- (1) Pengawas Pemilihan melakukan penelusuran atas kebenaran informasi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Dalam hal ditemukan kebenaran berupa dugaan pelanggaran, pengawas Pemilihan melakukan Penindakan.
- (3) Pengawas Pemilihan memutuskan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Temuan melalui rapat pleno pengawas Pemilihan.
- (4) Keputusan pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditindaklanjuti dengan menuangkan dalam formulir model A.2.
- (5) Tindak lanjut atas informasi awal yang didapatkan pengawas Pemilihan dari laporan sebagaimana diatur pada Pasal 11, diinformasikan kepada Pelapor pemberi informasi.

Bagian Kelima

Penelitian Laporan

Pasal 13

- (1) Petugas penerima Laporan meneliti pemenuhan syarat formal dan syarat materiel dalam formulir model A.1.
- (2) Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas Pelapor/pihak yang berhak melaporkan;
 - b. identitas pihak terlapor;
 - c. waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran; dan
 - d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan Dugaan Pelanggaran dengan kartu identitas.
- (3) Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peristiwa dan uraian kejadian;
 - b. tempat peristiwa terjadi;

- c. saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan
- d. bukti.

Pasal 14

- (1) Laporan Dugaan Pelanggaran yang memenuhi syarat formal dan materiel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), petugas penerima Laporan meneruskan Laporan tersebut kepada bagian/petugas yang menangani/mengkaji pelanggaran.
- (2) Laporan Dugaan Pelanggaran yang belum memenuhi syarat formal dan materiel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), petugas penerima Laporan melakukan konfirmasi kepada Pelapor untuk segera melengkapi persyaratan.
- (3) Dalam hal Laporan Dugaan Pelanggaran tidak memenuhi syarat formal tetapi memenuhi syarat materiel, menjadi informasi awal adanya dugaan pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilihan dengan melakukan penelusuran untuk dapat dijadikan Temuan.
- (4) Dalam hal Laporan Dugaan Pelanggaran yang tidak memenuhi syarat materiel, Bawaslu atau pengawas Pemilihan melakukan kajian bahwa laporan tidak dapat diterima.

Bagian Keenam

Temuan dan Laporan Tindak Pidana Pemilihan

Pasal 15

- (1) Bawaslu menerima Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilihan.
- (2) Pengawas Pemilihan menerima Laporan atau menemukan dugaan Tindak Pidana Pemilihan.
- (3) Dalam menerima Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu dapat didampingi dan dibantu oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.

- (4) Dalam menerima Temuan/Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dapat didampingi dan dibantu oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.
- (5) Temuan/Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilihan dilakukan pembahasan pada Sentra Gakkumdu.

BAB III

PENANGANAN PELANGGARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Bawaslu dapat melakukan penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
- (2) Pengawas Pemilihan melakukan penanganan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada tempat terjadinya pelanggaran.
- (3) Laporan Dugaan Pelanggaran yang telah ditangani dan diselesaikan oleh pengawas Pemilihan tidak bisa dilaporkan kembali.

Bagian Kedua

Pengambilalihan

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan tertentu, pengawas Pemilihan secara berjenjang dapat mengambil alih penanganan pelanggaran yang menjadi Temuan atau dilaporkan kepada pengawas Pemilihan di tingkat bawah.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tempat dan kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan terjadi di wilayah lintas daerah provinsi, lintas

- daerah kabupaten/kota, lintas kecamatan, lintas kelurahan, desa, dan/atau nama lainnya;
- b. dinonaktifkan, diberhentikan sementara, atau diberhentikan tetap dari jabatan sebagai pengawas Pemilihan;
 - c. tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban;
 - d. keterbatasan kemampuan, sarana dan prasarana dalam menangani dugaan pelanggaran bagi Panwas Kecamatan atau nama lain serta pengawas Pemilihan Lapangan.
- (3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam rapat pleno pengawas Pemilihan, kecuali bagi PPL.

Bagian Ketiga

Waktu Penanganan Pelanggaran

Pasal 18

- (1) Bawaslu dan pengawas Pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, paling lama 3 (tiga) hari setelah Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran diterima dan diregistrasi.
- (2) Dalam hal diperlukan, Bawaslu atau pengawas Pemilihan dapat meminta keterangan tambahan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

Bagian Keempat

Kajian Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran

Pasal 19

- (1) Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran yang telah memenuhi syarat formal dan materiel, petugas penerima Laporan melakukan pemberkasan Laporan Dugaan Pelanggaran.

- (2) Berkas Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada bagian/petugas yang menangani/mengkaji dugaan pelanggaran

Pasal 20

- (1) Kajian dugaan Pelanggaran Pemilihan dibuat oleh Bawaslu atau pengawas Pemilihan dan dapat dibantu oleh petugas yang ditunjuk.
- (2) Kajian dugaan pelanggaran menggunakan sistematika kajian sebagai berikut:
 - a. kasus posisi;
 - b. data;
 - c. kajian;
 - d. kesimpulan; dan
 - e. rekomendasi;
- (3) Sistematika kajian tertuang dalam formulir model A.8.
- (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia selama belum diputuskan dalam rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu, serta Ketua dan Anggota pengawas Pemilihan.
- (5) Penomoran formulir model A.8 menggunakan penomoran yang sama dengan nomor dalam formulir model A.1 untuk Laporan Dugaan Pelanggaran atau formulir model A.2 untuk Temuan Dugaan Pelanggaran.

Pasal 21

- (1) Dalam proses pengkajian Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran, Bawaslu atau pengawas Pemilihan dapat meminta kehadiran Pelapor, terlapor, pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi, untuk diklarifikasi atau ahli untuk didengar keterangannya di bawah sumpah.
- (2) Klarifikasi terhadap Pelapor, terlapor, pihak yang diduga pelaku pelanggaran, dan/atau saksi, dilakukan oleh Bawaslu atau pengawas Pemilihan.

- (3) Kehadiran Pelapor, terlapor, dan/atau pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud pada (1) dapat didampingi oleh kuasa hukum atau tim kampanye.
- (4) Keterangan dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara klarifikasi pada formulir model A.7.
- (5) Berita acara klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk tim klarifikasi, dan 1 (satu) rangkap untuk pihak yang diklarifikasi yang meliputi Pelapor, terlapor, saksi, atau ahli.
- (6) Dalam hal pihak yang diklarifikasi tidak bersedia untuk mendatangi berita acara klarifikasi, pengawas Pemilihan menyatakan ketidakbersediaan pihak yang diklarifikasi dalam berita acara klarifikasi dan berita acara klarifikasi ditandatangani oleh pihak yang melakukan klarifikasi.

Paragraf 1

Tim Klarifikasi Bawaslu

Pasal 22

- (1) Bawaslu dapat membentuk tim klarifikasi untuk melakukan klarifikasi atau meminta keterangan.
- (2) Tim klarifikasi Bawaslu terdiri atas ketua dan/atau anggota, atau tenaga ahli dan/atau tim asistensi, atau pejabat struktural, dan/atau staf divisi Penindakan.
- (3) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu.
- (4) Ketua Bawaslu dapat memberikan mandat secara lisan atau tertulis kepada Anggota atau Sekretaris Jenderal, atau pejabat struktural untuk menandatangani keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas nama Ketua Bawaslu.

Paragraf 2

Tim Klarifikasi Bawaslu Provinsi

Pasal 23

- (1) Bawaslu Provinsi dapat membentuk tim klarifikasi untuk melakukan klarifikasi atau meminta keterangan.
- (2) Tim klarifikasi Bawaslu Provinsi terdiri atas ketua dan/atau anggota, tim asistensi, pejabat struktural, dan/atau staf sekretariat.
- (3) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu Provinsi.
- (4) Ketua Bawaslu Provinsi dapat memberikan mandat secara lisan atau tertulis kepada Anggota atau sekretaris Bawaslu Provinsi, atau pejabat struktural untuk menandatangani keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas nama Ketua Bawaslu Provinsi.

Paragraf 3

Tim Klarifikasi Panwas Kabupaten/Kota
dan Kecamatan atau Nama Lain

Pasal 24

- (1) Panwas Kabupaten/Kota dapat membentuk tim klarifikasi untuk melakukan klarifikasi atau meminta keterangan.
- (2) Tim klarifikasi Panwas Kabupaten/Kota terdiri atas ketua dan/atau anggota, pejabat struktural, dan/atau staf sekretariat.
- (3) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua Panwas Kabupaten/Kota.
- (4) Ketua Panwas Kabupaten/Kota dapat memberikan mandat secara lisan atau tertulis kepada Anggota atau Sekretaris Panwas Kabupaten/Kota, atau pejabat struktural untuk menandatangani keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas nama Ketua Panwas Kabupaten/Kota.

Pasal 25

- (1) Panwas Kecamatan atau nama lain dapat membentuk tim klarifikasi untuk melakukan klarifikasi atau meminta keterangan.
- (2) Tim klarifikasi Panwas Kecamatan atau nama lain terdiri atas ketua dan/atau anggota, pejabat struktural, dan/atau staf sekretariat.
- (3) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua Panwas Kecamatan atau nama lain.
- (4) Ketua Panwas Kecamatan atau nama lain dapat memberikan mandat secara lisan atau tertulis kepada Anggota atau Sekretaris Panwas Kecamatan atau nama lain, atau pejabat struktural untuk menandatangani keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas nama Ketua Panwas Kecamatan.

Bagian Kelima

Hasil Kajian Pengawas Pemilihan

Pasal 26

- (1) Hasil kajian terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan dituangkan dalam formulir model A.8 dikategorikan sebagai:
 - a. Pelanggaran Pemilihan;
 - b. bukan Pelanggaran Pemilihan; atau
 - c. sengketa Pemilihan.
- (2) Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan;
 - b. Pelanggaran Administrasi Pemilihan; dan/atau
 - c. Tindak Pidana Pemilihan.

Bagian Keenam
Pendampingan dan Supervisi

Pasal 27

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan atau nama lain dapat melakukan pendampingan kepada pengawas Pemilihan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya jika mengalami kesulitan dalam melakukan pengkajian dugaan Pelanggaran Pemilihan.
- (2) Pendampingan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan atau nama lain dilakukan atas permintaan tertulis pengawas Pemilihan secara berjenjang.
- (3) Bawaslu dan Bawaslu Provinsi memutuskan dalam rapat pleno untuk melakukan pendampingan kepada pengawas Pemilihan di tingkat bawah dalam Penanganan Pelanggaran.
- (4) Tata cara pendampingan akan diatur lebih lanjut dalam pedoman penanganan pelanggaran.

Pasal 28

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan atau nama lain dapat melakukan supervisi kepada pengawas Pemilihan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya dalam proses penanganan Pelanggaran Pemilihan.
- (2) Tata cara supervisi akan diatur lebih lanjut dalam pedoman penanganan pelanggaran.

BAB IV
TINDAK LANJUT PENANGANAN PELANGGARAN

Bagian Kesatu
Pelanggaran Pemilihan

Paragraf 1
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

Pasal 29

- (1) Bawaslu dan pengawas Pemilihan meneruskan rekomendasi pelanggaran kode etik kepada DKPP.
- (2) Penerusan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir model A.9 dengan melampirkan berkas pelanggaran.
- (3) Berkas Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. formulir Temuan/Laporan;
 - b. kajian; dan
 - c. bukti.

Paragraf 2

Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Pasal 30

- (1) Bawaslu dan pengawas Pemilihan memutuskan Temuan dan Laporan sebagai pelanggaran atau bukan pelanggaran berdasarkan hasil kajian.
- (2) Bawaslu atau pengawas Pemilihan memberikan rekomendasi terhadap Temuan atau Laporan yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
- (3) Bawaslu atau pengawas Pemilihan menyampaikan rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai dengan tingkatannya yang dituangkan dalam formulir model A.10.

- (4) Dalam hal rekomendasi dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang ditujukan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau Peserta Pemilihan tidak ditindaklanjuti, Bawaslu memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis.

Paragraf 3

Tindak Pidana Pemilihan

Pasal 31

Temuan/Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu atau pengawas Pemilihan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Sentra Gakkumdu sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir model A.11.

Pasal 32

- (1) Dalam hal hasil kajian yang dikategorikan bukan dugaan Pelanggaran Pemilihan dan bukan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lain, proses penanganan pelanggaran dihentikan.
- (2) Hasil kajian yang dikategorikan bukan dugaan Pelanggaran Pemilihan namun termasuk dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan lain, diteruskan kepada instansi yang berwenang.
- (3) Penghentian dan/atau penerusan dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu atau pengawas Pemilihan.

Bagian Ketiga

Sengketa Pemilihan

Pasal 33

- (1) Terhadap hasil kajian yang dikategorikan sebagai sengketa Pemilihan disampaikan kepada Pelapor untuk mengajukan permohonan Sengketa Pemilihan kepada

bidang penyelesaian sengketa Pemilihan untuk ditindaklanjuti sebagai sengketa Pemilihan.

- (2) Tata cara pengajuan Sengketa mengacu pada Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

BAB V

STATUS PENANGANAN PELANGGARAN

Pasal 34

- (1) Status penanganan pelanggaran wajib diumumkan di Sekretariat Bawaslu atau pengawas Pemilihan sebagai Pemberitahuan mengenai status penanganan Temuan/Laporan yang dicantumkan dalam formulir model A.13.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di papan pengumuman.
- (3) Pemberitahuan status pelanggaran dapat disampaikan kepada Pelapor melalui surat.

BAB VI

PENGAWASAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI

Pasal 35

- (1) Bawaslu dan pengawas Pemilihan mengawasi atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi penanganan pelanggaran oleh instansi yang berwenang.
- (2) Bawaslu Provinsi mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, Sekretaris dan Pegawai Sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung.
- (3) Bawaslu dan pengawas Pemilihan mengawasi atas pelaksanaan putusan pengadilan dan putusan DKPP.

Pasal 36

Panwas Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung.

Pasal 37

Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 34 serta format nomor penerimaan laporan pelanggaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 23, Pasal 28, Pasal 36, Pasal 42 ayat (4) dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 792) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 773) sepanjang mengatur mengenai mekanisme Penindakan, penanganan pelanggaran, tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran, status penanganan dugaan pelanggaran dan pengawasan tindak lanjut rekomendasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2017

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABHAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG PENANGANAN LAPORAN
PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA

A. FORMAT NOMOR PENERIMAAN LAPORAN PELANGGARAN

No. (1) / (2) / (3) / (4) / (5) / (6) / (7)

KETERANGAN:

- (1) Urutan nomor Laporan/Temuan.
- (2) Jenis Laporan atau Temuan:
 - a. “LP” untuk Laporan
 - b. “TM” untuk Temuan
- (3) Jenis Pemilihan
 - a. “PG” untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
 - b. “PB” untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
 - c. “PW” untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
- (4) Kode Pengawas Pemilu:
 - a. “RI” untuk Bawaslu RI
 - b. “Prov” untuk Bawaslu Provinsi
 - c. “Kab” untuk Pengawas Pemilu Kabupaten
 - d. “Kota” untuk Pengawas Pemilu Kota
 - e. “Kec (Nama Kecamatan)” untuk Pengawas Pemilu Kecamatan
 - f. “PPL (Nama Kelurahan)” untuk Pengawas Pemilu Lapangan
- (5) Kode Wilayah:

| NO. | KODE WILAYAH | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA |
|-----|--------------|----------------|---------------------------|
| 1. | 01.00 | Provinsi Aceh | |
| 2. | 01.01 | | Kota Banda Aceh |
| 3. | 01.02 | | Kota Subulussalam |
| 4. | 01.03 | | Kota Langsa |
| 5. | 01.04 | | Kota Lhokseumawe |
| 6. | 01.05 | | Kota Sabang |
| 7. | 01.06 | | Kabupaten Aceh Barat |
| 8. | 01.07 | | Kabupaten Aceh Barat Daya |
| 9. | 01.08 | | Kabupaten Aceh Besar |
| 10. | 01.09 | | Kabupaten Aceh Jaya |
| 11. | 01.10 | | Kabupaten Aceh Selatan |
| 12. | 01.11 | | Kabupaten Aceh Singkil |
| 13. | 01.12 | | Kabupaten Aceh Tamiang |
| 14. | 01.13 | | Kabupaten Aceh Tengah |
| 15. | 01.14 | | Kabupaten Aceh Tenggara |
| 16. | 01.15 | | Kabupaten Aceh Timur |
| 17. | 01.16 | | Kabupaten Aceh Utara |
| 18. | 01.17 | | Kabupaten Bener Meria |
| 19. | 01.18 | | Kabupaten Bireun |
| 20. | 01.19 | | Kabupaten Gayo Lues |
| 21. | 01.20 | | Kabupaten Nagan Raya |
| 22. | 01.21 | | Kabupaten Pidie |
| 23. | 01.22 | | Kabupaten Pidie Jaya |
| 24. | 01.23 | | Kabupaten Simeuleu |
| 25. | 02.00 | Sumatera Utara | |
| 26. | 02.01 | | Kota Medan |
| 27. | 02.02 | | Kota Binjai |
| 28. | 02.03 | | Kota Padang Sidempuan |
| 29. | 02.04 | | Kota Pematang Siantar |
| 30. | 02.05 | | Kota Sibolga |
| 31. | 02.06 | | Kota Tanjung Balai |
| 32. | 02.07 | | Kota Tebingtinggi |
| 33. | 02.08 | | Kota Gunung Sitoli |
| 34. | 02.09 | | Kabupaten Asahan |
| 35. | 02.10 | | Kabupaten Batubara |
| 36. | 02.11 | | Kabupaten Dairi |

| | | | |
|-----|-------|----------------|-------------------------------|
| 37. | 02.12 | | Kabupaten Deliserdang |
| 38. | 02.13 | | Kabupaten Humban Hasundutan |
| 39. | 02.14 | | Kabupaten Karo |
| 40. | 02.15 | | Kabupaten Labuhanbatu |
| 41. | 02.16 | | Kabupaten Langkat |
| 42. | 02.17 | | Kabupaten Mandailing Natal |
| 43. | 02.18 | | Kabupaten Nias |
| 44. | 02.19 | | Kabupaten Nias Selatan |
| 45. | 02.20 | | Kabupaten Pakpakbgarat |
| 46. | 02.21 | | Kabupaten Samosir |
| 47. | 02.22 | | Kabupaten Serdang Bedagai |
| 48. | 02.23 | | Kabupaten Simalungun |
| 49. | 02.24 | | Kabupaten Tapanuli Selatan |
| 50. | 02.25 | | Kabupaten Tapanuli Tengah |
| 51. | 02.26 | | Kabupaten Tapanuli Utara |
| 52. | 02.27 | | Kabupaten Toba Samosir |
| 53. | 02.28 | | Kabupaten Padang Lawas Utara |
| 54. | 02.29 | | Kabupaten Padang Lawas |
| 55. | 02.30 | | Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| 56. | 02.31 | | Kabupaten Labuhanbatu Selatan |
| 57. | 02.32 | | Kabupaten Nias Barat |
| 58. | 02.33 | | Kabupaten Nias Utara |
| 59. | 03.00 | Sumatera Barat | |
| 60. | 03.01 | | Kota Padang |
| 61. | 03.02 | | Kota Bukittinggi |
| 62. | 03.03 | | Kota Padang Panjang |
| 63. | 03.04 | | Kota Pariaman |
| 64. | 03.05 | | Kota Payakumbuh |
| 65. | 03.06 | | Kota Sawahlunto |
| 66. | 03.07 | | Kota Solok |
| 67. | 03.08 | | Kabupaten Agam |
| 68. | 03.09 | | Kabupaten Dharmasraya |
| 69. | 03.10 | | Kabupaten Limapuluhkota |
| 70. | 03.11 | | Kabupaten Kepulauan Mentawai |
| 71. | 03.12 | | Kabupaten Padang Pariaman |
| 72. | 03.13 | | Kabupaten Pasaman |
| 73. | 03.14 | | Kabupaten Pasaman Barat |

| | | | |
|------|-------|------------------|--------------------------------|
| 74. | 03.15 | | Kabupaten Pesisir Selatan |
| 75. | 03.16 | | Kabupaten Sawahlunto Sijunjung |
| 76. | 03.17 | | Kabupaten Solok |
| 77. | 03.18 | | Kabupaten Solok Selatan |
| 78. | 03.19 | | Kabupaten Tanah Datar |
| 79. | 04.00 | Provinsi Riau | |
| 80. | 04.01 | | Kota Pekanbaru |
| 81. | 04.02 | | Kota Dumai |
| 82. | 04.03 | | Kabupaten Bengkalis |
| 83. | 04.04 | | Kabupaten Indragiri Hilir |
| 84. | 04.05 | | Kabupaten Indragiri Hulu |
| 85. | 04.06 | | Kabupaten Kampar |
| 86. | 04.07 | | Kabupaten Kuantan Singingi |
| 87. | 04.08 | | Kabupaten Pelalawan |
| 88. | 04.09 | | Kabupaten Rokan Hulu |
| 89. | 04.10 | | Kabupaten Rokan Hilir |
| 90. | 04.11 | | Kabupaten Siak |
| 91. | 04.12 | | Kabupaten Kepulauan Meranti |
| 92. | 05.00 | Jambi | |
| 93. | 05.01 | | Kota Jambi |
| 94. | 05.02 | | Kota Sungai Penuh |
| 95. | 05.03 | | Kabupaten Batanghari |
| 96. | 05.04 | | Kabupaten Bungo |
| 97. | 05.05 | | Kabupaten Kerinci |
| 98. | 05.06 | | Kabupaten Merangin |
| 99. | 05.07 | | Kabupaten Muaro Jambi |
| 100. | 05.08 | | Kabupaten Sarolangun |
| 101. | 05.09 | | Kabupaten Tanjung Jabung Barat |
| 102. | 05.10 | | Kabupaten Tanjung Jabung Timur |
| 103. | 05.11 | | Kabupaten Tebo |
| 104. | 06.00 | Sumatera Selatan | |
| 105. | 06.01 | | Kota Palembang |
| 106. | 06.02 | | Kota Lubuk Linggau |
| 107. | 06.03 | | Kota Pagar Alam |
| 108. | 06.04 | | Kota Prabumulih |
| 109. | 06.05 | | Kabupaten Banyuasin |
| 110. | 06.06 | | Kabupaten Lahat |

| | | | |
|------|-------|----------|-------------------------------|
| 111. | 06.07 | | Kabupaten Empat Lawang |
| 112. | 06.08 | | Kabupaten Muara Enim |
| 113. | 06.09 | | Kabupaten Musi Banyuasin |
| 114. | 06.10 | | Kabupaten Musi Rawas |
| 115. | 06.11 | | Kabupaten Ogan Ilir |
| 116. | 06.12 | | Kabupaten Ogan Komering Ilir |
| 117. | 06.13 | | Kabupaten Ogan Kemering Ulu |
| 118. | 06.14 | | Kabupaten OKU Selatan |
| 119. | 06.15 | | Kabupaten OKU Timur |
| 120. | 06.16 | | Kabupaten Penukal Abab |
| 121. | 06.17 | | Kabupaten Musi Rawas Utara |
| 122. | 07.00 | Bengkulu | |
| 123. | 07.01 | | Kota Bengkulu |
| 124. | 07.02 | | Kota Bengkulu Selatan |
| 125. | 07.03 | | Kota Bengkulu Utara |
| 126. | 07.04 | | Kabupaten Kaur |
| 127. | 07.05 | | Kabupaten Kepahiang |
| 128. | 07.06 | | Kabupaten Lebong |
| 129. | 07.07 | | Kabupaten Muko Muko |
| 130. | 07.08 | | Kabupaten Rejang Lebong |
| 131. | 07.09 | | Kabupaten Seluma |
| 132. | 07.10 | | Kabupaten Bengkulu Tengah |
| 133. | 08.00 | Lampung | |
| 134. | 08.01 | | Kota Bandarlampung |
| 135. | 08.02 | | Kota Metro |
| 136. | 08.03 | | Kabupaten Lampung Barat |
| 137. | 08.04 | | Kabupaten Lampung Selatan |
| 138. | 08.05 | | Kabupaten Lampung Tengah |
| 139. | 08.06 | | Kabupaten Lampung Timur |
| 140. | 08.07 | | Kabupaten Lampung Utara |
| 141. | 08.08 | | Kabupaten Tanggamus |
| 142. | 08.09 | | Kabupaten Tulang Bawang |
| 143. | 08.10 | | Kabupaten Way Kanan |
| 144. | 08.11 | | Kabupaten Pesawaran |
| 145. | 08.12 | | Kabupaten Pringsewu |
| 146. | 08.13 | | Kabupaten Mesuji |
| 147. | 08.14 | | Kabupaten Tulang Bawang Barat |

| | | | |
|------|-------|-----------------|---|
| 148. | 08.15 | | Kabupaten Pesisir Barat |
| 149. | 09.00 | Bangka Belitung | |
| 150. | 09.01 | | Kota Pangkalpinang |
| 151. | 09.02 | | Kabupaten Bangka |
| 152. | 09.03 | | Kabupaten Bangka Barat |
| 153. | 09.04 | | Kabupaten Bangka Selatan |
| 154. | 09.05 | | Kabupaten Bangka Tengah |
| 155. | 09.06 | | Kabupaten Belitung |
| 156. | 09.07 | | Kabupaten Belitung Timur |
| 157. | 10.00 | Kepulauan Riau | |
| 158. | 10.01 | | Kota Tanjung pinang |
| 159. | 10.02 | | Kota Batam |
| 160. | 10.03 | | Kabupaten Karimun |
| 161. | 10.04 | | Kabupaten Bintan |
| 162. | 10.05 | | Kabupaten Lingga |
| 163. | 10.06 | | Kabupaten Natuna |
| 164. | 10.07 | | Kabupaten Kepulauan Anambas |
| 165. | 11.00 | Banten | |
| 166. | 11.01 | | Kota Serang |
| 167. | 11.02 | | Kota Tangerang |
| 168. | 11.03 | | Kota Tangerang Selatan |
| 169. | 11.04 | | Kota Cilegon |
| 170. | 11.05 | | Kabupaten Lebak |
| 171. | 11.06 | | Kabupaten Pandeglang |
| 172. | 11.07 | | Kabupaten Serang |
| 173. | 11.08 | | Kabupaten Tangerang |
| 174. | 12.00 | DKI Jakarta | |
| 175. | 12.01 | | Kota Administrasi Jakarta Pusat |
| 176. | 12.02 | | Kota Administrasi Jakarta Barat |
| 177. | 12.03 | | Kota Administrasi Jakarta Selatan |
| 178. | 12.04 | | Kota Administrasi Jakarta Timur |
| 179. | 12.05 | | Kota Administrasi Jakarta Utara |
| 180. | 12.06 | | Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu |
| 181. | 13.00 | Jawa Barat | |
| 182. | 13.01 | | Kota Bandung |
| 183. | 13.02 | | Kota Banjar |
| 184. | 13.03 | | Kota Bekasi |

| | | | |
|------|-------|-------------|-------------------------|
| 185. | 13.04 | | Kota Bogor |
| 186. | 13.05 | | Kota Cimahi |
| 187. | 13.06 | | Kota Cirebon |
| 188. | 13.07 | | Kota Depok |
| 189. | 13.08 | | Kota Sukabumi |
| 190. | 13.09 | | Kota Tasikmalaya |
| 191. | 13.10 | | Kabupaten Bandung |
| 192. | 13.11 | | Kabupaten Bandung Barat |
| 193. | 13.12 | | Kabupaten Bekasi |
| 194. | 13.13 | | Kabupate Bogor |
| 195. | 13.14 | | Kabupaten Ciamis |
| 196. | 13.15 | | Kabupaten Cianjur |
| 197. | 13.16 | | Kabupaten Cirebon |
| 198. | 13.17 | | Kabupaten Garut |
| 199. | 13.18 | | Kabupaten Indramayu |
| 200. | 13.19 | | Kabupaten Karawang |
| 201. | 13.20 | | Kabupaten Kuningan |
| 202. | 13.21 | | Kabupaten Majalengka |
| 203. | 13.22 | | Kabupaten Purwakarta |
| 204. | 13.23 | | Kabupaten Subang |
| 205. | 13.24 | | Kabupaten Sukabumi |
| 206. | 13.25 | | Kabupaten Sumedang |
| 207. | 13.26 | | Kabupaten Tasikmalaya |
| 208. | 13.27 | | Kabupaten Pangandaran |
| 209. | 14.00 | Jawa Tengah | |
| 210. | 14.01 | | Kota Semarang |
| 211. | 14.02 | | Kota magelang |
| 212. | 14.03 | | Kota Pekalongan |
| 213. | 14.04 | | Kota Salatiga |
| 214. | 14.05 | | Kota Surakarta |
| 215. | 14.06 | | Kota Tegal |
| 216. | 14.07 | | Kabupaten Banjarnegara |
| 217. | 14.08 | | Kabupaten Banyumas |
| 218. | 14.09 | | Kabupaten Batang |
| 219. | 14.10 | | Kabupaten Blora |
| 220. | 14.11 | | Kabupaten Boyolali |
| 221. | 14.12 | | Kabupaten Brebes |

| | | | |
|------|-------|---------------|------------------------|
| 222. | 14.13 | | Kabupaten Cilacap |
| 223. | 14.14 | | Kabupaten Demak |
| 224. | 14.15 | | Kabupaten Grobogan |
| 225. | 14.16 | | Kabupaten Jepara |
| 226. | 14.17 | | Kabupaten Karanganyar |
| 227. | 14.18 | | Kabupaten Kebumen |
| 228. | 14.19 | | Kabupaten Kendal |
| 229. | 14.20 | | Kabupaten Klaten |
| 230. | 14.21 | | Kabupaten Kudus |
| 231. | 14.22 | | Kabupaten Magelang |
| 232. | 14.23 | | Kabupaten Pati |
| 233. | 14.24 | | Kabupaten Pekalongan |
| 234. | 14.25 | | Kabupaten Pemalang |
| 235. | 14.26 | | Kabupaten Purbalingga |
| 236. | 14.27 | | Kabupaten Purworejo |
| 237. | 14.28 | | Kabupaten Rembang |
| 238. | 14.29 | | Kabupaten Semarang |
| 239. | 14.30 | | Kabupaten Sragen |
| 240. | 14.31 | | Kabupaten Sukoharjo |
| 241. | 14.32 | | Kabupaten Tegal |
| 242. | 14.33 | | Kabupaten Temanggung |
| 243. | 14.34 | | Kabupaten Wonogiri |
| 244. | 14.35 | | Kabupaten Wonosobo |
| 245. | 15.00 | DI Yogyakarta | |
| 246. | 15.01 | | Kota Yogyakarta |
| 247. | 15.02 | | Kabupaten Bantul |
| 248. | 15.03 | | Kabupaten Gunung Kidul |
| 249. | 15.04 | | Kabupaten Kulon Progo |
| 250. | 15.05 | | Kabupaten Sleman |
| 251. | 16.00 | Jawa Timur | |
| 252. | 16.01 | | Kota Surabaya |
| 253. | 16.02 | | Kota Batu |
| 254. | 16.03 | | Kota Blitar |
| 255. | 16.04 | | Kota Kediri |
| 256. | 16.05 | | Kota Madiun |
| 257. | 16.06 | | Kota Malang |
| 258. | 16.07 | | Kota Mojokerto |

| | | | |
|------|-------|------|-----------------------|
| 259. | 16.08 | | Kota Pasuruan |
| 260. | 16.09 | | Kota Probolinggo |
| 261. | 16.10 | | Kabupaten Bangkalan |
| 262. | 16.11 | | Kabupaten banyuwangi |
| 263. | 16.12 | | Kabupaten Blitar |
| 264. | 16.13 | | Kabupaten Bojonegoro |
| 265. | 16.14 | | Kabupaten Bondowoso |
| 266. | 16.15 | | Kabupaten Gresik |
| 267. | 16.16 | | Kabupaten Jember |
| 268. | 16.17 | | Kabupaten Jombang |
| 269. | 16.18 | | Kabupaten Kediri |
| 270. | 16.19 | | Kabupaten Lamongan |
| 271. | 16.20 | | Kabupaten Lumajang |
| 272. | 16.21 | | Kabupaten Madiun |
| 273. | 16.22 | | Kabupaten Magetan |
| 274. | 16.23 | | Kabupaten Malang |
| 275. | 16.24 | | Kabupaten Mojokerto |
| 276. | 16.25 | | Kabupaten Nganjuk |
| 277. | 16.26 | | Kabupaten Ngawi |
| 278. | 16.27 | | Kabupaten Pacitan |
| 279. | 16.28 | | Kabupaten Pamekasan |
| 280. | 16.29 | | Kabupaten Pasuruan |
| 281. | 16.30 | | Kabupaten Ponorogo |
| 282. | 16.31 | | Kabupaten Probolinggo |
| 283. | 16.32 | | Kabupaten Sampang |
| 284. | 16.33 | | Kabupaten Sidoarjo |
| 285. | 16.34 | | Kabupaten Situbondo |
| 286. | 16.35 | | Kabupaten Sumenep |
| 287. | 16.36 | | Kabupaten Trenggalek |
| 288. | 16.37 | | Kabupaten Tulungagung |
| 289. | 16.38 | | Kabupaten Tuban |
| 290. | 17.00 | Bali | |
| 291. | | | Kota Denpasar |
| 292. | 17.01 | | Kabupaten Badung |
| 293. | 17.02 | | Kabupaten Bangli |
| 294. | 17.03 | | Kabupaten Buleleng |
| 295. | 17.04 | | Kabupaten Gianyar |

| | | | |
|------|-------|---------------------|--------------------------------|
| 296. | 17.05 | | Kabupaten Jembrana |
| 297. | 17.06 | | Kabupaten Karang Asem |
| 298. | 17.07 | | Kabupaten Klungkung |
| 299. | 17.08 | | Kabupaten Tabanan |
| 300. | 18.00 | Nusa Tenggara Barat | |
| 301. | 18.01 | | Kota Mataram |
| 302. | 18.02 | | Kota Bima |
| 303. | 18.03 | | Kabupaten Bima |
| 304. | 18.04 | | Kabupaten Dompu |
| 305. | 18.05 | | Kabupaten Lombok Barat |
| 306. | 18.06 | | Kabupaten Lombok Tengah |
| 307. | 18.07 | | Kabupaten Lombok Timur |
| 308. | 18.08 | | Kabupaten Sumbawa |
| 309. | 18.09 | | Kabupaten Sumbawa Barat |
| 310. | 18.10 | | Kabupaten Lombok Utara |
| 311. | 19.00 | Nusa Tenggara Timur | |
| 312. | 19.01 | | Kota Kupang |
| 313. | 19.02 | | Kabupaten Alor |
| 314. | 19.03 | | Kabupaten Belu |
| 315. | 19.04 | | Kabupaten Ende |
| 316. | 19.05 | | Kabupaten Flores Timur |
| 317. | 19.06 | | Kabupaten Kupang |
| 318. | 19.07 | | Kabupaten Lembata |
| 319. | 19.08 | | Kabupaten Manggarai |
| 320. | 19.09 | | Kabupaten Manggarai Barat |
| 321. | 19.10 | | Kabupaten NGada |
| 322. | 19.11 | | Kabupaten Nagekeo |
| 323. | 19.12 | | Kabupaten Rote Ndao |
| 324. | 19.13 | | Kabupaten Sikka |
| 325. | 19.14 | | Kabupaten Sumba Barat |
| 326. | 19.15 | | Kabupaten Sumba Barat Daya |
| 327. | 19.16 | | Kabupaten Sumba Tengah |
| 328. | 19.17 | | Kabupaten Manggarai Timur |
| 329. | 19.18 | | Kabupaten Sumba Timur |
| 330. | 19.19 | | Kabupaten Timor Tengah Selatan |
| 331. | 19.20 | | Kabupaten Timor Tengah Utara |
| 332. | 19.21 | | Kabupaten Sabu Rajjua |

| | | | |
|------|-------|--------------------|------------------------------|
| 333. | 19.22 | | Kabupaten Malaka |
| 334. | 20.00 | Kalimantan Barat | |
| 335. | 20.01 | | Kota Pontianak |
| 336. | 20.02 | | Kota Singkawang |
| 337. | 20.03 | | Kabupaten Bengkayang |
| 338. | 20.04 | | Kabupaten Kapuas Hulu |
| 339. | 20.05 | | Kabupaten Ketapang |
| 340. | 20.06 | | Kabupaten Kayong Utara |
| 341. | 20.07 | | Kabupaten Kubu Raya |
| 342. | 20.08 | | Kabupaten Landak |
| 343. | 20.09 | | Kabupaten Melawi |
| 344. | 20.10 | | Kabupaten Pontianak |
| 345. | 20.11 | | Kabupaten Sambas |
| 346. | 20.12 | | Kabupaten Sanggau |
| 347. | 20.13 | | Kabupaten Sintang |
| 348. | 20.14 | | Kabupaten Sekadau |
| 349. | 21.00 | Kalimantan Tengah | |
| 350. | 21.01 | | Kota Palangkaraya |
| 351. | 21.02 | | Kabupaten Barito Selatan |
| 352. | 21.03 | | Kabupaten Barito Timur |
| 353. | 21.04 | | Kabupaten Barito Utara |
| 354. | 21.05 | | Kabupaten Gunung Mas |
| 355. | 21.06 | | Kabupaten Kapuas |
| 356. | 21.07 | | Kabupaten Katingan |
| 357. | 21.08 | | Kabupaten Kotawaringin Barat |
| 358. | 21.09 | | Kabupaten Kotawaringin Timur |
| 359. | 21.10 | | Kabupaten Lamandau |
| 360. | 21.11 | | Kabupaten Murung Raya |
| 361. | 21.12 | | Kabupaten Pulang Pisau |
| 362. | 21.13 | | Kabupaten Seruyan |
| 363. | 21.14 | | Kabupaten Sukamara |
| 364. | 22.00 | Kalimantan Selatan | |
| 365. | 22.01 | | Kota Banjarmasin |
| 366. | 22.02 | | Kota Banjar Baru |
| 367. | 22.03 | | Kabupaten Balangan |
| 368. | 22.04 | | Kabupaten Banjar |
| 369. | 22.05 | | Kabupaten Barito Kuala |

| | | | |
|------|-------|------------------|-------------------------------------|
| 370. | 22.06 | | Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| 371. | 22.07 | | Kabupaten Hulu Sungai Tengah |
| 372. | 22.08 | | Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| 373. | 22.09 | | Kabupaten Kotabaru |
| 374. | 22.10 | | Kabupaten Tabalong |
| 375. | 22.11 | | Kabupaten Tanah Bumbu |
| 376. | 22.12 | | Kabupaten Tanah Laut |
| 377. | 22.13 | | Kabupaten Tapin |
| 378. | 23.00 | Kalimantan Timur | |
| 379. | 23.01 | | Kota Samarinda |
| 380. | 23.02 | | Kota Balikpapan |
| 381. | 23.03 | | Kota Bontang |
| 382. | 23.04 | | |
| 383. | 23.05 | | Kabupaten Berau |
| 384. | 23.06 | | |
| 385. | 23.07 | | Kabupaten Kutai Barat |
| 386. | 23.08 | | Kabupaten Kutai Kertanegara |
| 387. | 23.09 | | Kabupaten Kutai Timur |
| 388. | 23.10 | | Kabupaten Panajam Paser Utara |
| 389. | 23.11 | | Kabupaten Paser |
| 390. | 23.12 | | Kabupaten Mahakam Ulu |
| 391. | 24.00 | Kalimantan Utara | |
| 392. | 24.01 | | Kota Tarakan |
| 393. | 24.02 | | Kabupaten Malinau |
| 394. | 24.03 | | Kabupaten Tana Tidung |
| 395. | 24.04 | | Kabupaten Bulungan |
| 396. | 24.05 | | Kabupaten Nunukan |
| 397. | 25.00 | Sulawesi Utara | |
| 398. | 25.01 | | Kota Manado |
| 399. | 25.02 | | Kota Kotamobagu |
| 400. | 25.03 | | Kota Bitung |
| 401. | 25.04 | | Kota Tomohon |
| 402. | 25.05 | | Kabupaten Bolaang Mongondow |
| 403. | 25.06 | | Kabupaten Bolaang Mongondow Utara |
| 404. | 25.07 | | Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan |
| 405. | 25.08 | | Kabupaten Bolaang Mongondow |

| | | | |
|------|-------|------------------|--|
| | | | Timur |
| 406. | 25.09 | | Kabupaten Minahasa |
| 407. | 25.10 | | Kabupaten Kepulauan Talaud |
| 408. | 25.11 | | Kabupaten Minahasa Selatan |
| 409. | 25.12 | | Kabupaten Minahasa Utara |
| 410. | 25.13 | | Kabupaten Minahasa Tenggara |
| 411. | 25.14 | | Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro |
| 412. | 25.15 | | Kabupaten Kepulauan Sangihe |
| 413. | 26.00 | Sulawesi Tengah | |
| 414. | 26.01 | | Kota Palu |
| 415. | 26.02 | | Kabupaten Banggai |
| 416. | 26.03 | | Kabupaten Banggai Kepulauan |
| 417. | 26.04 | | Kabupaten Buol |
| 418. | 26.05 | | Kabupaten Donggala |
| 419. | 26.06 | | Kabupaten Morowali |
| 420. | 26.07 | | Kabupaten Parigi Moutong |
| 421. | 26.08 | | Kabupaten Poso |
| 422. | 26.09 | | Kabupaten Tojo Una Una |
| 423. | 26.10 | | Kabupaten Toli Toli |
| 424. | 26.11 | | Kabupaten Sigi |
| 425. | 26.12 | | Kabupaten Banggai Laut |
| 426. | 26.13 | | Kabupaten Morowali Utara |
| 427. | 27.00 | Sulawesi Selatan | |
| 428. | 27.01 | | Kota Makassar |
| 429. | 27.02 | | Kota Pare Pare |
| 430. | 27.03 | | Kota Palopo |
| 431. | 27.04 | | Kabupaten Bone |
| 432. | 27.05 | | Kabupaten Bulukumba |
| 433. | 27.06 | | Kabupaten Enrekang |
| 434. | 27.07 | | Kabupaten Gowa |
| 435. | 27.08 | | Kabupaten Jenepono |
| 436. | 27.09 | | Kabupaten Luwu |
| 437. | 27.10 | | Kabupaten Luwu Timur |
| 438. | 27.11 | | Kabupaten Luwu Utara |
| 439. | 27.12 | | Kabupaten Maros |
| 440. | 27.13 | | Kabupaten Pangkep |
| 441. | 27.14 | | Kabupaten Pinrang |

| | | | |
|------|-------|-------------------|-----------------------------|
| 442. | 27.15 | | Kabupaten Sidenreng Rappang |
| 443. | 27.16 | | Kabupaten Sinjai |
| 444. | 27.17 | | Kabupaten Soppeng |
| 445. | 27.18 | | Kabupaten Takalar |
| 446. | 27.19 | | Kabupaten Tanatoraja |
| 447. | 27.20 | | Kabupaten Wajo |
| 448. | 27.21 | | Kabupaten Toraja Utara |
| 449. | 27.22 | | Kabupaten Selayar |
| 450. | 27.23 | | Kabupaten Bantaeng |
| 451. | 27.24 | | Kabupaten Barru |
| 452. | 28.00 | Sulawesi Tenggara | |
| 453. | 28.01 | | Kota Kendari |
| 454. | 28.02 | | Kota Bau Bau |
| 455. | 28.03 | | Kabupaten Bombana |
| 456. | 28.04 | | Kabupaten Buton |
| 457. | 28.05 | | Kabupaten Konawe |
| 458. | 28.06 | | Kabupaten Kolaka |
| 459. | 28.07 | | Kabupaten Kolaka Utara |
| 460. | 28.08 | | Kabupaten Konawe Selatan |
| 461. | 28.09 | | Kabupaten Muna |
| 462. | 28.10 | | Kabupaten Wakatobi |
| 463. | 28.11 | | Kabupaten Konawe Utara |
| 464. | 28.12 | | Kabupaten Buton Utara |
| 465. | 28.13 | | Kabupaten Kolaka Timur |
| 466. | 28.14 | | Kabupaten Konawe Kepulauan |
| 467. | 28.15 | | Kabupaten Muna Barat |
| 468. | 28.16 | | Kabupaten Buton Tengah |
| 469. | 28.17 | | Kabupaten Buton Selatan |
| 470. | 29.00 | Gorontalo | |
| 471. | 29.01 | | Kota Gorontalo |
| 472. | 29.02 | | Kabupaten Boalemo |
| 473. | 29.03 | | Kabupaten Bone Bolango |
| 474. | 29.04 | | Kabupaten Gorontalo |
| 475. | 29.05 | | Kabupaten Gorontalo Utara |
| 476. | 29.06 | | Kabupaten Pohuwato |
| 477. | 30.00 | Sulawesi Barat | |
| 478. | 30.01 | | Kabupaten Mamuju |

| | | | |
|------|-------|--------------|---------------------------------|
| 479. | 30.02 | | Kabupaten Majene |
| 480. | 30.03 | | Kabupaten Mamuju Utara |
| 481. | 30.04 | | Kabupaten Mamasa |
| 482. | 30.05 | | Kabupaten Polewali Mandar |
| 483. | 30.06 | | Kabupaten Mamuju Tengah |
| 484. | 31.00 | Maluku | |
| 485. | 31.01 | | Kota Ambon |
| 486. | 31.02 | | Kota Tual |
| 487. | 31.03 | | Kabupaten Buru |
| 488. | 31.04 | | Kabupaten Kepulauan Aru |
| 489. | 31.05 | | Kabupaten Seram Bagian Barat |
| 490. | 31.06 | | Kabupaten Seram Bagian Timur |
| 491. | 31.07 | | Kabupaten Maluku Tengah |
| 492. | 31.08 | | Kabupaten Maluku Tenggara |
| 493. | 31.09 | | Kabupaten Maluku Tenggara Barat |
| 494. | 31.10 | | Kabupaten Maluku Barat Daya |
| 495. | 31.11 | | Kabupaten Buru Selatan |
| 496. | 32.00 | Maluku Utara | |
| 497. | 32.01 | | Kota Ternate |
| 498. | 32.02 | | Kota Tidore Kepulauan |
| 499. | 32.03 | | Kabupaten Halmahera Barat |
| 500. | 32.04 | | Kabupaten Halmahera Selatan |
| 501. | 32.05 | | Kabupaten Halmahera Tengah |
| 502. | 32.06 | | Kabupaten Halmahera Timur |
| 503. | 32.07 | | Kabupaten Halmahera Utara |
| 504. | 32.08 | | Kabupaten Kepulauan Sula |
| 505. | 32.09 | | Kabupaten Morotai |
| 506. | 32.10 | | Kabupaten Pulau Taliabu |
| 507. | 33.00 | Papua | |
| 508. | 33.01 | | Kota Jayapura |
| 509. | 33.02 | | Kabupaten Asmat |
| 510. | 33.03 | | Kabupaten Biak Numfor |
| 511. | 33.04 | | Kabupaten Boven Digoel |
| 512. | 33.05 | | Kabupaten Jayapura |
| 513. | 33.06 | | Kabupaten Jayawijaya |
| 514. | 33.07 | | Kabupaten Keerom |
| 515. | 33.08 | | Kabupaten Mappi |

| | | | |
|------|-------|-------------|--------------------------------|
| 516. | 33.09 | | Kabupaten Merauke |
| 517. | 33.10 | | Kabupaten Mimika |
| 518. | 33.11 | | Kabupaten Paniai |
| 519. | 33.12 | | Kabupaten Pegunungan Bintang |
| 520. | 33.13 | | Kabupaten Puncak Jaya |
| 521. | 33.14 | | Kabupaten Sarmi |
| 522. | 33.15 | | Kabupaten Memberamo Raya |
| 523. | 33.16 | | Kabupaten Supiori |
| 524. | 33.17 | | Kabupaten Tolikara |
| 525. | 33.18 | | Kabupaten Yahukimo |
| 526. | 33.19 | | Kabupaten Yapen Waropen |
| 527. | 33.20 | | Kabupaten Waropen |
| 528. | 33.21 | | Kabupaten Nabire |
| 529. | 33.22 | | Kabupaten Memberamo Tengah |
| 530. | 33.23 | | Kabupaten Yalimo |
| 531. | 33.24 | | Kabupaten Lanny Jaya |
| 532. | 33.25 | | Kabupaten Nduga |
| 533. | 33.26 | | Kabupaten Puncak |
| 534. | 33.27 | | Kabupaten Dogiyai |
| 535. | 33.28 | | Kabupaten Diyai |
| 536. | 33.29 | | Kabupaten Intan Jaya |
| 537. | 34.00 | Papua Barat | |
| 538. | 34.01 | | Kota Sorong |
| 539. | 34.02 | | Kabupaten Fak fak |
| 540. | 34.03 | | Kabupaten Kaimana |
| 541. | 34.04 | | Kabupaten Kepulauan Raja Ampat |
| 542. | 34.05 | | Kabupaten Manokwari |
| 543. | 34.06 | | Kabupaten Sorong Selatan |
| 544. | 34.07 | | Kabupaten Teluk Bintuni |
| 545. | 34.08 | | Kabupaten Sorong |
| 546. | 34.09 | | Kabupaten Teluk Wondama |
| 547. | 34.10 | | Kabupaten Tambrau |
| 548. | 34.11 | | Kabupaten Maybrat |
| 549. | 34.12 | | Kabupaten Manokwari Selatan |
| 550. | 34.13 | | Kabupaten Pegunungan Arfak |

(6) Kode Bulan Penerimaan Laporan/Temuan:

- a. "I" untuk Januari
- b. "II" untuk Februari
- c. "III" untuk Maret
- d. "IV" untuk April
- e. "V" untuk Mei
- f. "VI" untuk Juni
- g. "VII" untuk Juli
- h. "VIII" untuk Agustus
- i. "IX" untuk September
- j. "X" untuk Oktober
- k. "XI" untuk November
- l. "XII" untuk Desember

(7) Kode Tahun:

- a. "2017" untuk Tahun 2017
- b. "2018" untuk Tahun 2018
- c. "2019" untuk Tahun 2019

Contoh:

- (1) penomoran Laporan yang diterima oleh PPL Desa Sukaramai Kecamatan Baiturrahman di Kota Banda Aceh pada saat Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh di pada tanggal 25 Desember 2016
Contoh: No. 01/LP/PW/PPL. Sukaramai/01.01/XII/2016
- (2) Penomoran Temuan yang ditemukan oleh Panwaslu Kota Banda Aceh Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh di wilayah Kota Banda Aceh pada tanggal 02 Januari 2017
Contoh: No. 01/TM/PG/Kot/01.01/I/2017
- (3) Penomoran Laporan yang ditemukan oleh Panwaslu Kota Banda Aceh Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh di wilayah Kota Banda Aceh pada tanggal 03 Januari 2017
Contoh: No. 02/LP/PG/Kot/01.01/I/2017
- (4) Penomoran Laporan yang ditemukan oleh Panwas Kecamatan Baiturrahman di Kota Banda Aceh pada saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada tanggal 3 Januari 2017
Contoh: No. 01/LP/PG/Cam. Baiturrahman/01.01/I/2017

B. FORMULIR MODEL A.1

PENERIMAAN LAPORAN

Nomor :

Nasional :

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Kecamatan :

Desa/Kelurahan :

1. Pelapor
 - a. Nama :
.....
 - b. Nomor Identitas (KTP/Paspor/SIM) :
.....
 - c. Tempat/Tgl Lahir :
.....
 - d. Jenis Kelamin :
.....
 - e. Pekerjaan :
.....
 - f. Kewarganegaraan :
.....
 - g. Alamat :
.....
 - h. No. Telp/HP :
.....
 - i. Fax :
.....
 - j. E-Mail :
.....

2. Peristiwa yang dilaporkan
 - a. Peristiwa :
.....
 - b. Tempat Kejadian :
.....
 - c. Hari dan Tanggal Kejadian :
.....
 - d. Waktu Kejadian :
.....
 - e. Terlapor :
.....
 - f. Alamat Terlapor*** :
.....
 - g. No. Telp/HP Terlapor :
.....

Hari dan Tanggal :
Waktu/jam :

Saya menyatakan bahwa isi laporan ini adalah yang sebenar-benarnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum.

Penerima Laporan

Pelapor



(tanda tangan dan nama jelas)

(tanda tangan dan nama jelas)

Keterangan:

**) sesuai dengan jenis Pemilu*

****) tidak wajib diisi.*

****) jika alamat tempat tinggal lengkap tidak diketahui, cukup disebutkan dusun/desa/kelurahan terlapor.*

C. FORMULIR MODEL A.2

FORMULIR TEMUAN

Nomor :

Nasional :

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Kecamatan :

Desa/Kelurahan :

1. Data Pengawas

a. Nama :

b. Jabatan :

c. Alamat :

2. Peristiwa yang ditemukan

a. Peristiwa :

b. Tempat Kejadian :

c. Hari dan Tanggal ditemukan :

d. Waktu Kejadian :

e. Terlapor :

f. Alamat Terlapor** :

g. No. Telp/HP Terlapor :

3. Saksi

1. Nama :

Alamat** :

No. Telp/HP :

2. Nama :

Alamat** :

No. Telp/HP :

3. Nama :

Alamat** :

No. Telp/HP :

4. Bukti:

a.

- b.
- c.
- d.
- e.

5. Uraian singkat kejadian :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., tanggal.....

Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Panwas Kab/Kota...../Panwas
Kecamatan...../PPL...../Pengawas TPS,

(tanda tangan dan nama jelas)
(jabatan)

D. FORMULIR MODEL A.3

TANDA BUKTI PENERIMAAN
LAPORAN

Nomor :

Telah diterima
dari Nama :
Organisasi :
Alamat :
No. Telp/HP :
Hari dan Tanggal :
Waktu :

Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota,*)
Provinsi...../ Kabupaten...../ Kota.....,*) Tahun.....

_____, _____ ** Diterima oleh,

CAP

(tanda tangan dan nama jelas)

Penerima Laporan

(tanda tangan dan nama jelas)

Pelapor

Keterangan:

*) Sesuai dengan Nomor laporan dan

**) Tempat, tanggal, bulan, tahun.

E. FORMULIR MODEL A.4



Nomor :
Hal : Undangan Klarifikasi

Kepada Yth
.....
di -
.....

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

2. Berdasarkan Laporan/Temuan* Nomor....., bersama ini kami Bawaslu/ Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan mengundang Sdr. untuk memberikan keterangan dalam klarifikasi perihal**

3. Klarifikasi akan dilaksanakan pada:

- a. Hari dan Tanggal :
- b. Waktu :
- c. Pukul :
- d. Tempat :
- e. Bertemu dengan :

4. Demikian untuk menjadi maklum.

_____, _____ ***

PENGAWAS PEMILU,

**** KETUA,



(tanda tangan dan nama jelas)

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu.

**) Uraikan secara jelas klarifikasi yang akan dilakukan.

***) Tempat, tanggal, bulan, tahun. disesuaikan

***) Sesuai dengan nama lembaga.

F. FORMULIR MODEL A.5



KETERANGAN/KLARIFIKASI DI BAWAH SUMPAH/JANJI

Pertanyaan:

Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan/klarifikasi dibawah sumpah/janji*)?

Jawaban:

Ya, saya bersedia/tidak bersedia

----- Pada hari ini tanggalbulan, pukulWIB/WITA/WIT,
saya:

-----:-----:-----

Bersedia bersumpah/berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yakni agama** terkait dengan***

Demi Allah (bagi yang beragama Islam)/ (bagi yang beragama)*, bahwa saya akan memberi keterangan/klarifikasi yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Demikian sumpah/janji saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntunan agama dan kepercayaan yang saya anut.

Saya yang bersumpah/berjanji,

Meterai Rp 6000

(tanda tangan dan nama jelas)

Keterangan:

* disesuaikan dengan agama/kepercayaan pihak yang bersumpah

** Disesuaikan dengan agama/kepercayaan pihak yang bersumpah.

*** Disesuaikan dengan dugaan pelanggaran yang dilaporkan.

G. FORMULIR MODEL A.6



KETERANGAN AHLI DI BAWAH SUMPAH/JANJI

Pertanyaan:

Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan/klarifikasi dibawah sumpah/janji*)?

Jawaban:

Ya, saya bersedia/tidak bersedia

----- Pada hari ini tanggalbulan, pukulWIB/WITA/WIT, saya:

-----:_____:

Bersedia bersumpah/berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yakni agama** terkait dengan***

Demi Allah (bagi yang beragama Islam)/ (bagi yang beragama)*, bahwa saya akan memberi keterangan/klarifikasi yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Demikian sumpah/janji saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntunan agama dan kepercayaan yang saya anut.

Saya yang bersumpah/berjanji,

Meterai Rp 6000

(tanda tangan dan nama jelas)

Keterangan:

*) Disesuaikan dengan agama/kepercayaa pihak yang bersumpah

***) Disesuaikan dengan agama/kepercayaan pihak yang bersumpah.

****) Disesuaikan dengan dugaan pelanggaran yang dilaporkan.

H. FORMULIR MODEL A.7



BERITA ACARA KLARIFIKASI

----- Pada hari ini Tanggalbulantahun....., pukul WIB/
WITA/ WIT, saya-----
-----:-----:-----

Jabatan sebagai, pada Badan Pengawas Pemilihan Umum/ Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi...../ Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten/Kota...../ Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan...../Pengawas Pemilihan Lapangan...../ Pengawas
TPS...../ tersebut diatas, berdasarkan Surat Tugas nomor
:.....tanggal, bersama :-----

jabatan sebagai, pada Badan Pengawas Pemilihan
Umum/ Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi...../ Panitia
Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota...../ Panitia Pengawas
Pemilihan Kecamatan...../Pengawas Pemilihan Lapangan...../
Pengawas TPS.....tersebut diatas, telah meminta keterangan dari
seorang yang bernama:

-----:-----:-----

Dilahirkan di tanggal Bulan Tahun
(umur
.....Tahun), pekerjaan, Agama:, Kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di

Ia (.....) didengar keterangannya sebagai, terkait
dengan.....
.....

Atas pertanyaan Saya/Kami, yang bersangkutan menjawab serta
menerangkan sebagai berikut:

PERTANYAAN:

Pertanyaan Pembuka

1. Apakah Saudara pada hari ini berada dalam kondisi sehat jasmani dan
rohani untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait dengan laporan di
atas?-----

-----01.Jawaban).-----

2. Apakah pada hari ini (sesuai tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas),
Saudara bersedia untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait dengan
adanya.....?-----

-----02.Jawaban).-----

3. Mengertikah Saudara mengapa dimintai keterangan seperti saat ini?

Jelaskan! -----
-----03.Jawaban).-----

Pertanyaan Isi (Berkaitan dengan Kasus)*
04.**_
-

-----04.Jawaban).-----
05.**_
-

-----05.Jawaban).-----
06.**_
-

-----06.Jawaban).-----

Pertanyaan Penutup
7. Apakah menurut Saudara, semua keterangan atau jawaban yang Saudara sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum?-----
-----07.Jawaban).-----

8. Apakah masih ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin Saudara sampaikan?-----

-----08.Jawaban).-----

9. Apakah Saudara bersedia untuk memberikan keterangan kembali apabila diperlukan ? -----

-----09.Jawaban).-----

10. Apakah Saudara dalam memberi keterangan atau jawaban merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain?-----

-----10.Jawaban).-----

-----Setelah keterangan diberikan/disampaikan, hasilnya dibacakan kembali kepada pihak yang memberi keterangan/jawaban dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Setelah diakui kebenaran atas keterangan/jawaban yang disampaikan kepada Panwaslu, pemberi keterangan membubuhkan tanda tangan di atas meterai Rp.6.000,- seperti di bawah ini.-----

YANG MEMBERI KETERANGAN,

(tanda tangan dan nama jelas)

----- Demikian berita acara klarifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian ditutup dan ditanda tangani di, pada Pukul....., hari tanggal Tahun 20.....-----

YANG MEMINTA KETERANGAN,

(tanda tangan dan nama jelas)

Keterangan

*) Coret yang tidak perlu

**) *Pengawas Pemilu menambah pertanyaan lebih detail untuk menggali informasi atau kesesuaian keterangan saksi serta mendapatkan bukti dengan substansi dan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan penanganan kasus.*

I. FORMULIR MODEL A.8

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

*Nomor

Nasional :

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Kecamatan :

Desa/Kelurahan :

I. Pokok Masalah

.....

II. D a t a

- | | | |
|---------------------------|---|-------|
| 1. Pelapor/Penemu ** | : | |
| 2. Pekerjaan/Jabatan | : | |
| 3. Alamat | : | |
| 4. Terlapor/Pelaku*** | : | |
| 5. Pekerjaan | : | |
| 6. Alamat | : | |
| 7. Tanggal Laporan/Temuan | : | |
| 8. Tanggal Peristiwa | : | |
| 9. Bukti-Bukti | : | |
| | : | |
| | : | |

III. Kajian

- | | | |
|----------------------------------|---|-------|
| 1. Dasar Hukum | : | |
| 2. Fakta | : | |
| 3. Analisis | : | |
| a. Tentang Temuan/Laporan* | : | |
| b. Tentang Penemu/Pelapor* | : | |
| c. Tentang Terlapor | : | |
| d. Tentang Waktu Temuan/Laporan* | : | |
| e. Tentang dugaan pelanggaran | : | |

IV. Kesimpulan

:.....

V. Rekomendasi

:.....

_____, _____ ****

PENGAWAS PEMILU.....*****

.....*****



(tanda tangan dan nama jelas)

Keterangan:

- *) Nomor sama dengan form penerimaan laporan/Temuan form A-1/A-2.*
- ***) Pelapor untuk Laporan Pelanggaran Pemilu, dan Pengawas Pemilu untuk Temuan Dugaan Pelanggaran.*
- ****) Terlapor untuk Laporan Pelanggaran Pemilu, dan Pelaku untuk Temuan Dugaan Pelanggaran.*
- *****) Tempat, tanggal, bulan, tahun.*
- *****) Disesuaikan dengan nama lembaga.*
- *****) Bidang Penanganan Pelanggaran.*

J. FORMULIR MODEL A.9



Nomor :
 Hal : Penerusan Pelanggaran
 Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

Kepada Yth.
 Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
 di -

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah Ketua dan Anggota Bawaslu, kasus yang dilaporkan/ ditemukan oleh dengan Nomor Laporan/Temuan*(terlampir) diduga kuat merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

_____, _____ **

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KETUA,



(tanda tangan dan nama jelas)

Keterangan

*Coret yang tidak perlu.

** Tempat, tanggal, bulan, tahun.

K. FORMULIR MODEL A.10



Nomor :
 Hal : Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Kepada Yth.
 Ketua KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota/PPK/PPS*
 di -

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi, kajian, dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemilihan, dugaan pelanggaran yang dilaporkan/ditemukan oleh dengan Nomor Laporan/Temuan *(terlampir) merupakan pelanggaran administrasi Pemilihan, selanjutnya diteruskan kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KP Kota/PPK/PPS* untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

_____, _____ **

Ketua Pengawas Pemilihan.....***



(tanda tangan dan nama jelas)

Keterangan
 *Coret yang tidak perlu.
 ** Tempat, tanggal, bulan, tahun.

****Disesuaikan dengan nama lembaga.*

L. FORMULIR MODEL A.11



Nomor :
 Hal : Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan

Kepada Yth.
 Kapolri/Kapolda/Kapolwiltabes/Kapoltabes/Kapolres/Kapolresta/Metro/
 Kapolsek/Metro/Kapolsekta*
 di -

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi, kajian, dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemilihan, kasus yang dilaporkan/ditemukan* oleh dengan No. Laporan/Temuan* (terlampir) diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan, dan selanjutnya diteruskan kepada Kapolri/Kapolda/Kapolwiltabes/Kapoltabes/Kapolres/Kapolresta/Metrp /Kapolsek/Metro/Kapolsekta* untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

_____, _____ **

Ketua Pengawas Pemillihan.....***



(tanda tangan dan nama jelas)

Keterangan

- *Coret yang tidak perlu.
- ** Tempat, tanggal, bulan, tahun.
- ***Disesuaikan dengan nama lembaga.

M. FORMULIR MODEL A.12



Nomor :
Hal : Penerusan Pelanggaran Pelanggaran Hukum Lainnya

Kepada Yth.
Kepala Badan/Kepala Dinas/Ketua/Direktur Jenderal/dst*
di -
.....

4. Dasar :

- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi, kajian, dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemilihan, kasus yang dilaporkan/ditemukan* oleh dengan No. Laporan/Temuan* (terlampir) diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran , dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala Badan/Kepala Dinas/Ketua/Direktur Jenderal/dst* untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Demikian untuk menjadi maklum.

_____ (hari) _____, _____ (tanggal) _____ **

Ketua Pengawas Pemilihan.....***



(tanda tangan dan nama jelas)

Keterangan

*Coret yang tidak perlu.

** Tempat, tanggal, bulan, tahun.

***Disesuaikan dengan nama lembaga.

N. FORMULIR MODEL A.13



PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN/TEMUAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan/temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilihan, diberitahukan status laporan/temuan sebagai berikut:

| NO. | NAMA PELAPOR/PENGAWAS PEMILIHAN* DAN TERLAPOR/PELAKU | NOMOR LAPORAN/ TEMUAN | STATUS LAPORAN/ TEMUAN | INSTANSI TUJUAN/ ALASAN |
|-----|--|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | | |

Catatan:

1. Ditindaklanjuti ke instansi tujuan:
 - a. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. **
 - b. KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota. **
 - c. Penyidik di Mabes Polri/ Polda/ Polwil/ Polwiltabes/ Polres/ Metro/ Polsek/ Polsekta. **
 - d. Instansi lain.
2. Alasan tidak ditindaklanjuti, karena:
 - a. Temuan/Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan materiel pelaporan.
 - b. Temuan/Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu.
 - c. Melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang.
 - d. Alasan lainnya

Diumumkan

-----,----- 20..... **

Pengawas Pemilu..... ****,

CAP

(tanda tangan dan nama jelas)

Keterangan:

- *) Nama Pelapor boleh tidak dicantumkan jika Pelapor meminta namanya dirahasiakan terkait dengan sifat laporan.*
- ***) Tempat, tanggal, bulan, tahun.*
- *****) Disesuaikan dengan nama lembaga.*

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABHAN